



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang,

Hendaknya Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renja ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 - 2026 yang akan menjadi pedoman Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024.

Makassar , 31 Agustus 2023

Kepala Badan,



Prof. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	7
2.2 Analisis Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.3.1 Aspek Hasil Kerja	30
2.3.2 Aspek Internal	30
2.3.3 Aspek Eksternal	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	59
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
4.1 Rencana Kerja	65
BAB V PENUTUP	76
5.1 Catatan Penting	76
5.2 Kaidah Pelaksanaan	76
5.3 Rencana Tindak Lanjut	77



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1459/ X / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 13)
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 23)
14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1064/VII/Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Oktober 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 115 / VII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 07);
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47/I/ Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyusun nama-nama pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertugas :

- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renja SKPD Tahun 2024 termasuk capaian kemajuannya;
- b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja SKPD Tahun 2024;
- d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Renja SKPD Tahun 2024;
- e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renja;
- f. Menyusun Renja SKPD Tahun 2024.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja), bertanggung jawab terhadap penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

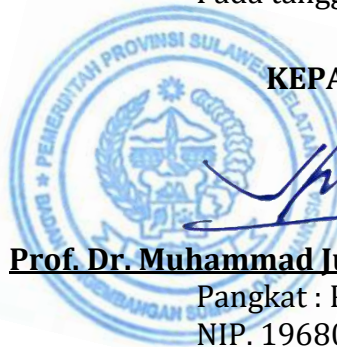
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan (DPA SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA BADAN



Muhammad Jufri

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. Pertinggal.

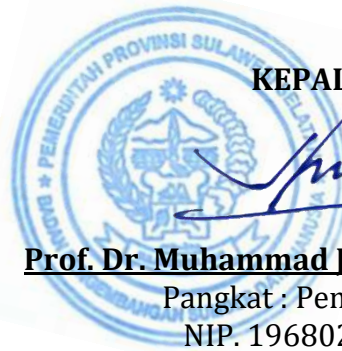
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 155 / VII / 2023
Tanggal : 03 Juli 2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Daftar Nama – nama Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan Renstra Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Penyusunan Renstra di BPSDM
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muhammad Akbar Sutarman, S.STP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Soeprapto, S.Psi, M.Psi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA BADAN



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, merupakan rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa meningkatkan pelayanan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global. Begitupula keberadaan SDM Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seiring dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemampuan yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan dunia yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya utamanya tuntutan kinerja pelayanan publik yang belum memadai. Menghadapi keadaan yang demikian, maka kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah menjadi sangat relevan, utamanya penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menyediakan layanan publik yang mandiri dan profesional.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah disusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran. Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2024-2026 disusun dengan memuat tujuan dan

sasaran, program, serta kegiatan yang merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sejalan dengan upaya pencapaian yang dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan dalam bentuk Program yang pelaksanaannya lebih dipertajam secara terukur dan terurai pada kegiatan-kegiatan, penjabaran program kerja organisasi dalam lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan. RENJA disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai. Penetapan tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Periode 2024-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024. Rencana Kerja (RENJA) ini menguraikan lebih rinci tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Secara umum Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat kebijakan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mewujudkan organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49/I/Tahun 2023 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
22. Perka LAN No. 05 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
23. Perka LAN No. 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 483/K.I/PDP.09 Tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan panduan dan informasi

kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan program tahunan tersebut antara lain :

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tersedianya tolak ukur rencana kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsi-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Terwujudnya komitmen bersama diantara Stakeholder terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra untuk diSulSelkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RENJA, maksud dan tujuan penyusunan RENJA serta sistematika penulisan RENJA.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab ini menyajikan gambaran Hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA perangkat daerah, dan program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Secara umum Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Urusan Pengembangan SDM, serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijaksanaan yang akan ditempuh, menggunakan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dari kebijaksanaan yang akan ditempuh. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan waktu yang akan dipergunakan. Hal ini sangat penting dan menentukan untuk penetapan indikator dan target kerja dalam proses penyusunan rencana kerja (RENJA) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran pelaksanaan Renstra Tahun Periode 2024-2026. Penyusunan Evaluasi Program kegiatan telah dilaksanakan sesuai jumlah alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2023.

Gambaran Evaluasi penggunaan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal serta Capaian Kinerja input, output dan outcome pada TA. 2024-2026 diuraikan pada tabel

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,01	Persen	0,05	0,01	0,01	100	0,01	100	100
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	Persen	98	98	98	100	98	100	100
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100	Persen	98	98	98	100	98	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Dokumen	18	18	18	100	23	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	4	4	100	4	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	10	10	10	100	15	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	Laporan	56	56	56	100	56	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	Orang/Bulan	134	134	134	100	134	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	2	2	2	100	2	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	4	4	100	4	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	2	2	100	2	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	Laporan	66	68	68	100	68	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	10	12	12	100	12	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	24	24	24	100	24	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	8	8	8	100	8	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	40	Unit	20	25	25	100	25	100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	Unit	20	25	25	100	25	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	24	24	24	100	24	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	64	Unit	35	38	38	100	38	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	10	13	13	100	13	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	3	3	3	100	3	100	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Unit	1	1	1	100	1	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2	Unit	1	1	1	100	1	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	Unit	20	20	20	100	20	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	12	Sertifikat	3	3	3	100	3	100	100
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3550	Orang	530	680	680	100	1070	100	100
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1070	Orang	530	680	680	100	1070	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	610	Orang	210	270	270	100	430	100	100
	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah Bersertifikat Kompetensi	90	Orang	30	30	30	100	30	100	100
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	610	Orang	240	300	300	100	460	100	100

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024-2026	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PD 2022	REALISASI RENJA PD 2022	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (%)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Dokumen	1	1	1	100	1	100	100

2.2. Analisis Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, maka telah ditetapkan satu program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 sebagai penjabaran dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 yakni :

Tujuan 1

- **Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel**

Sasaran 1

- **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**

Berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, dan/atau sumber dana lainnya yang sah. maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

A. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa kegiatan kediklatan yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Pelatihan Kepemimpinan. Adapun kegiatan kediklatan dalam program ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 4 Sub. Kegiatan;

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 7 Sub. Kegiatan;
- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional.
 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi.
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar.
 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Kegiatan - kegiatan ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen Pelatihan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (*training delivery*) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (*training development*). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (*training need analysis*) dalam rangka peningkatankompetensisumberdaya manusia yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi Jabatan ASN dan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakatlainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program Pelatihan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan system pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program Pelatihan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi Pelatihan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap

dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Penyusunan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini mengacu pada pertimbangan pada saat ini tercatat sekitar 450-an lembaga diklat baik yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (SIDA LAN RI, 2013). Dengan begitu banyaknya lembaga diklat aparatur, salah satu agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah penataan kelembagaan diklat daerah yang diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) lembaga diklat.

Penataan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki totalitas sistem organisasi diklat yang terdiri dari aspek-aspek kelembagaan diklat yang statis (*struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan*), dan aspek ketatalaksanaan dan proses yang dinamis seperti *pedoman kerja, tata hubungan kerja, dan koordinasi di dalam dan dengan organisasi luar*.

Penataan kelembagaan diklat ini perlu dilakukan mengingat fungsi penyelenggaraan diklat itu sangat terkait erat dengan berbagai stakeholders seperti bagian kepegawaian, instansi pengirim/dinas dan badan terkait. Disamping itu penataan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong lembaga diklat agar lebih berfokus pada upaya inovasi program dan metode pelaksanaan diklat yang efektif dalam peningkatan kompetensi aparatur. Dalam praktek kediklatan, kita masih menjumpai beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan kelembagaan diklat.

Diperlukan penataan koordinasi yang lebih erat antara bidang diklat dengan bidang kepegawaian terutama menyangkut rekrutmen dan seleksi calon peserta diklat, dan penempatan serta pemberdayaan alumni atau lulusan diklat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dari beberapa fenomena tersebut, maka diperlukan rumusan strategi penataan kelembagaan diklat daerah agar benar-benar mampu menjadi pendukung peningkatan kompetensi aparatur di daerah dan juga dalam rangka meningkatkan jejaring kediklatan maka diperlukan beberapa strategi dalam membangun Kemitraan dan Jejaring.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang dan keuangan, penyediaan sistem informasi manajemen Pelatihan, kepegawaian dan keuangan, pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta pengelolaan multi media pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusia yang terakreditasi,

sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Pelatihan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini adalah:

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelatihan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga Pengembangan sumber daya manusia terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola Pelatihan yang profesional dan mandiri, untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan melalui Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Penyusunan Laporan Tahunan Pelatihan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan Disiplin, Motivasi Kerja serta peningkatan Kualitas dan Kompetensi seluruh Sumber Daya Aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang menuntut adanya ketersediaan administrasi kepegawaian aparat OPD serta ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian.

C. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat 4 Kelompok Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi 3. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN 4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu dengan Kebutuhan Pagu Indikatif sebesar **Rp. 35.275.715.355,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

D. Indikator Kinerja

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 terdapat 2 Program dengan Indikator Kinerja **(Outcome)** sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya (Prioritas)

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern, dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan Nilai Hasil Memuaskan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan Indikator Kinerja (Outcome) adalah Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja BPSDM yang Akuntabel dan Transparan

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP			Persen	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			Persen	98	98	98	98	100	100	100	100	
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik			Persen	98	98	98	98	100	100	100	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	18	18	23	23	18	18	23	23	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	10	10	15	15	10	10	15	15	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Laporan	56	56	56	56	56	56	56	56	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/ Bulan	134	134	134	134	134	134	134	134	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Laporan	66	68	68	68	66	68	68	68	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	10	12	12	12	10	12	12	12	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	24	24	24	24	24	24	24	24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	8	8	8	8	8	8	8	8	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			Unit	20	25	25	25	20	25	25	25	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit	20	25	25	25	20	25	25	25	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	24	24	24	24	24	24	24	24	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Unit	35	38	38	38	35	38	38	38	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Unit	10	13	13	13	10	13	13	13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	20	20	20	20	20	20	20	20	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase PNS Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Smart ASN Provinsi Sulawesi Selatan			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Akreditasi Program Pelatihan			Sertifikat	3	3	3	3	3	3	3	3	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Orang	530	680	1070	3450	530	680	1070	3450	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			Orang	530	680	1070	3450	530	680	1070	3450	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional			Orang	210	270	430	550	210	270	430	550	
	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah Bersertifikat Kompetensi			Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Orang	240	300	460	580	240	300	460	580	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi penunjang yang telah digambarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, masih mempunyai permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga. Tantangan Global Birokrasi merupakan tantangan yang harus dihadapi di era saat ini. Adapun hal-hal yang eksternal yang mencangkup tantangan global yaitu Vuca, situasi yang mudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks dan ambiguitas, selanjutnya Digital Disruption yang merupakan perubahan terhadap teknologi digital serta proses bisnis yang mempengaruhi pelayanan publik. Millennial Disruption, Perubahan terhadap perilaku birokrat menjadi flexible, open minded, faster service. Pandemic Disruption, merupakan situasi pandemi yang mengubah tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah masih banyaknya PNS yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi PNS. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa isu permasalahan penting yang dihadapi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.1. Aspek Hasil Kerja (Kinerja)

- a. Belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
- b. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun), sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.
- c. Reformasi birokrasi terus diterapkan secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian. Reformasi birokrasi terus ditingkatkan sehingga memenuhi target reformasi birokrasi daerah yang sudah ditetapkan melalui program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai.

2.3.2. Aspek Internal

Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur belum memadai untuk mencetak aparatur berkelas dunia.

- a. Aspek kewenangan : Kapasitas dan kapabilitas BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencetak aparatur yang SMART ASN belum optimal.
- b. Aspek Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur : Kapasitas dan Kapabilitas Perencanaan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam merencanakan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- c. Aspek Pengordinasian : Kapasitas dan kapabilitas pengorganisasian BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan secara optimal.
- d. Aspek Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi : belum tercapainya proses pembelajaran berstandar internasional dan pembelajaran jarak jauh.
- e. Aspek Evaluasi dan Pengembangan Pelatihan : Kapasitas dan kapabilitas evaluasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan kompetensi.

2.3.3. Aspek Eksternal

Aspek eksternal berasal dari Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan tuntutan masyarakat, yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tuntutan Regulasi akan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis serta Pemerintahan.
- b. Tuntutan Grand Design Reformasi Birokrasi dan World Class Apparatus Tahun 2024.
- c. Tuntutan Masyarakat akan ASN yang Profesional sesuai perkembangan zaman.
- d. Tuntutan Kebutuhan SDM yang Kompeten untuk mendukung Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan.
- e. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani Masyarakat dengan cepat menggunakan sarana digital.

Pencapaian sasaran strategis BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama, yaitu :

- a. Bobot Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas Aparatur;
- b. Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi; dan
- c. Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, program kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target indicator kinerja, serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan serta telah dilakukan review pembahasan dan verifikasi serta finalisasi pemetaan program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					38.343.266.088					35.275.715.355	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98%	31.204.857.952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Makassar	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98%	31.616.193.388	
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	98%				Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	98%		
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,01%				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,01%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	23 Dokumen	1.030.285.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	23 Dokumen	912.342.000	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	644.554.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	773.465.880	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	65.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	65.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	65.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	18.240.000	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	65.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.240.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	124.930.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	65.916.120	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Laporan	22.936.166.388	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Laporan	24.816.865.288	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	22.326.671.888	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	24.326.671.888	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	304.126.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	364.951.680	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.640.700	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.168.840	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	67.710.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.252.240	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	67.580.400	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	30.096.480	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	62.273.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	23.727.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	40.163.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.996.560	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Laporan	650.957.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	225.957.600	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	255.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	395.957.600	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	225.957.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	50 Unit	1.386.262.608	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	50 Unit	1.250.994.038	
		Makassar	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	60 Orang			Makassar	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	60 Orang		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	228.987.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	46.785.120	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	24 Paket	284.669.548	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	24 Paket	581.603.458	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	199.265.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	59.265.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	302.523.660	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	212.523.660	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	370.816.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.816.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	39 Unit	850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Unit	380.000.000	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	195.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	115.000.000	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	180.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	280.000.000	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	3.079.240.536	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2.675.088.643	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.236.792.468	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.024.150.962	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.842.448.068	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.650.937.682	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	54 Unit	1.271.945.820	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	54 Unit	1.354.945.820	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	457.493.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	355.493.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	282.352.020	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	142.352.020	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	125.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 Unit	210.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 Unit	610.000.000	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Direhabilitasi					Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	197.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	197.100.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Makassar	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	7.138.408.136	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Makassar	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%	3.659.521.967	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%				Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	100%		
			Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%				Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100%		
			Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	3 Sertifikat				Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	3 Sertifikat		

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Makassar	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3450 Orang	2.682.491.434	Pengembangan Kompetensi Teknis	Makassar	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	250 Orang	975.352.744	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	129.499.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-	-	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	119.499.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-	-	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3450 Orang	2.173.994.434	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	250 Orang	898.196.184	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	259.499.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	77.156.560	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Makassar	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional	550 Orang	4.455.916.702	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Makassar	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional	450 Orang	2.684.169.223	
			Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersertifikat kompetensi	30 Orang				Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersertifikat kompetensi	15 Orang		

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	152.461.600	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	-	-	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	132.881.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	-	-	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Makassar	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	30 Orang	122.731.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Makassar	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	15 Orang	62.731.000	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Laporan	305.386.886	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Laporan	112.881.666	
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	507.555.300	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	12 Dokumen	226.304.584	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	550 Orang	2.904.091.316	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	450 Orang	2.051.442.373	

No	Rancangan Awal					Analisa Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	330.809.600	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	230.809.600	

Antara Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa perbedaan, diantaranya :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Akhir RKPD 2024, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Akhir RKPD 2024, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Akhir RKPD 2024 disebabkan target pendapatan yang menurun dari target tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak mencukupi. walaupun terjadi penurunan pagu anggaran tidak akan mempengaruhi atau berdampak pada target yang telah ditentukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang dimana semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat pada tabel T-C 32:

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran	Catatan Forum PD	
1	2	3	4	5	6	7	
		NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terutama pada pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa "*Rancangan RENJA-SKPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat*", telah menjadi acuan utama bagi satuan kerja pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja tahunannya. Kemudian pasal 23 ayat (4) pada peraturan ini, juga mempertegas hal tersebut, yaitu bahwa "RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

Dengan adanya aturan perundangan tersebut maka Badan Pengembangan sumber daya manusia berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang terkait dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai kegiatan utama pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pembangunan daerah. Selanjutnya pada sisi lain, kedudukan dan peran lembaga Pelatihan perlu semakin diperkuat dan ditingkatkan sejalan dengan nuansa, semangat dan filosofi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Perda ini memposisikan Badan Pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan membantu Gubernur dalam merumuskan, memfasilitasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan SDM aparatur dilingkup pemerintah provinsi dan kab/kota se Sulawesi Selatan, sehingga Gubernur dalam menjalankan kewenangannya, baik kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam bidang pengembangan SDM aparatur dengan sendirinya menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan 4 (empat) kebijakan yaitu :

1. Pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi 20jam/orang/tahun (manajerial, teknis, sosio kultural dan pemerintahan);
2. Kebijakan penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi di luar pembiayaan lainnya sebesar 0,34% dari Total Anggaran Belanja Daerah;
3. Pemenuhan Standar Kompetensi bagi seluruh ASN;
4. Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi bagi seluruh ASN melalui Uji Kompetensi;

Berkaitan dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia, khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan arah kebijakan pembangunan aparatur sipil negara yang dibagi menjadi empat tahapan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), dengan sasaran menciptakan Good Governance Tahun 2005 – 2009, mewujudkan Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014, memberlakukan Sistem Merit Tahun 2015 – 2019, dan mencapai Birokrasi Berkelas Dunia di tahun 2020 – 2024.

Saat ini pembangunan ASN sudah saatnya berada pada tahap pemberlakuan Sistem Merit sehingga Profesionalitas dan Kompetensi ASN dijadikan tolak ukur untuk peningkatan karir sumber daya aparatur. Peningkatan kompetensi aparatur tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan lembaga yang berfungsi membangun kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Hal tersebut di atas tentunya sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 21 Undang-

Undang tersebut disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh Pengembangan Kompetensi”. Hak PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi juga ditekankan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 203 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa “Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi”. Pada ayat (4) pasal 203 tersebut dijelaskan lagi bahwa “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun”. Dengan demikian sudah jelas kebijakan nasional yang mengamanatkan dilakukannya pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu pilar yang harus mampu menciptakan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur dari Badan Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memerlukan transformasi dalam berbagai aspek, terutama aspek perbaikan pelayanan. Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan provinsi, dimana dinamika kebutuhan atas kebutuhan pengembangan kompetensi SDM pemerintah yang kompleks, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu menjadi perangkat daerah yang mempersiapkan peningkatan kompetensi bagi aparatur di Sulawesi Selatan.

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang mempersiapkan aparatur Sulawesi Selatan, dituntut agar mempersiapkan aparatur yang mampu bekerja dan meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kemampuan yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam mencapai Visi, Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Terwujudnya Smart ASN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPSDM dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu tiga tahun yang akan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan serta visi, misi pembangunan daerah Sulawesi Selatan,

maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah menetapkan 4 (empat) sasaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun yang melatar belakangi sasaran tersebut adalah tuntutan zaman dan keinginan masyarakat akan pelayanan yang maksimal perlu diikuti dengan perkembangan kemampuan kompetensi aparatur, untuk itu BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan mengakomodir keinginan dan tuntutan tersebut dengan mempersiapkan peningkatan pengembangan kompetensi yang beragam, sehingga mulai aparatur tingkat bawah sampai pimpinan daerah tidak hanya menguasai satu jenis kompetensi saja melainkan dapat lebih berkembang dengan tersedianya pengembangan kompetensi baik manajerial, sosiokultural, teknis dan pemerintahan. Upaya ini diharapkan agar aparatur mempunyai peningkatan secara integritas dan profesionalisme dalam mengemban tugas pokoknya secara lebih baik agar masyarakat lebih percaya terhadap perilaku aparatur yang mencerminkan kualitas pemerintah.

2. Meningkatnya PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi

Pengembangan Kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah akan diujiberdasarkan kriteria tertentu, sehingga aparatur yang dihasilkan benar-benar aparatur yang mampu memberikan layanan terhadap masyarakat dan membantu mencerdaskan semua elemen masyarakat dengan pembuktian berupa sertifikat kompetensi. Sehingga aparatur yang benar-benar kompeten yang akan membantu menyelesaikan dan mengarahkan program kegiatan sesuai dengan kompetensinya Seperti istilah **“The Man Behind The Gun”** kehebatan dan kekuatan seorang aparatur bukan pada material akan tetapi siapa yang menggunakan kemampuan tersebut, seperti pisau yang harus diarah, demikian pula kemampuan aparatur perlu di asah dengan peningkatan kemampuan kompetensi agar mampu menghadapi tuntutan zaman yang berkembang terus menerus diiringi kemampuan perkembangan teknologi yang kian pesat. Sertifikasi merupakan jaminan aparatur yang kompeten di bidangnya sehingga dalam pemetaan aparatur tepat sasaran dalam mengemban tugas yang diberikan negara.

3. Meningkatnya Kompetensi Smart ASN.

Smart ASN merupakan kelompok aparatur yang memiliki kelebihan dengan ditandai dengan menguasai beberapa aspek, yaitu: Nasionalisme, Integritas,

Wawasan Global, Hospitality, Networking, Teknologi Informasi, Bahasa Asing, dan Entrepreneurship. Pengetahuan dan keterampilan Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan semakin berkembang dengan ditandai oleh banyaknya pejabat yang memiliki gelar akademis yang tinggi, sehingga secara logikapun mereka termasuk dalam golongan yang sudah matang, yang memiliki kelebihan dalam berpikir, berperilaku dan memiliki wawasan yang lebih dalam hal manajemen. Kelompok inilah yang disebut SMART ASN, Smart ASN harus merupakan aparatur yang “Talent Pool”. Talent Pool adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta yang jumlahnya kecil (ditentukan) yang menunjukkan superior performance atau istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku (tindak tanduk) bagi karyawan lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan.

Sehingga diharapkan ASN yang memiliki Talent Pool dapat menularkan kebiasaan tersebut kepada lingkungan sekitarnya dan akan berakar menjadi kebiasaan (habit) bagi masyarakat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyelenggarakan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan strategis. Oleh karena itu BPSDM Sulawesi Selatan juga ke depan akan mempersiapkan pengembangan kompetensi berbasis Talent Pool agar aparatur Sulawesi Selatan memiliki nilai tambah dalam menduduki jabatan yang strategis.

4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu

Untuk membentuk dan mempersiapkan aparatur yang SMART, diperlukan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas membutuhkan suatu sistem manajemen yang teruji, berkualitas, dan dinamis, dan ini ditemukan jika sistem manajemen diklat berbasis Corporate University (Corpu).

Seiring perkembangan zaman dan berawal dari perusahaan swasta yang harus bertahan dan berhasil digilas oleh kemajuan zaman dan tuntutan revolusi industry, muncullah istilah “Corporate University” (Corpu). Di Indonesia yang berhasil menerapkan sistem tersebut adalah Telkom Corpu, Corpu berbeda dengan konsep pendidikan dan latihan, Corpu mengacu pada program pengembangan SDM secara terarah dan sistematis, serta terkait dengan pencapaian visi-misi dan strategi suatu lembaga. Corpu lebih pada aktivitas business solution. Sementara itu, dalam konsep diklat atau Training Center (TC) program pembelajaran hanya dipandang sebagai proyek, bukan bagian dari change management.

Aktivitas TC lebih mengarah pada menutup kesenjangan kompetensi karyawan. Dalam konteks change management, idealnya kompetensi seperti itu bisa diaplikasikan lintas perusahaan, bahkan lintas industry. Ini memunculkan gagasan bahwa konsep Corpu seyogyanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan karyawan sendiri tapi juga membuka diri bagi karyawan perusahaan lain. Intinya manajemen Corpu merupakan sistem manajemen yang berguna untuk menopang organisasi dalam peningkatan kualitas SDM. Diharapkan dengan tercapainya 4 (empat) sasaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan ASN di Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan dan peluang baik dari dalam maupun dari luar.

Terdapat tujuh pondasi Corporate University yang harus disiapkan oleh BPSDM agar Corpu bisa berjalan baik, yakni:

1. Learning Strategic Governance

Yaitu dukungan dari pimpinan serta mengelola Corpu dalam sistem organisasi Sulawesi Selatan sebagai suatu kesatuan sistem learning.

2. Learning Focus

Pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan agenda Sulawesi Selatan.

3. Knowledge Management

Yakni bagaimana mengumpulkan dan mengelola best practice SulSel menjadi bahan pembelajaran untuk disampaikan ke setiap ASN atau tacit knowledge menjadi explicit knowledge.

4. Learning Infrastructure

Berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang menunjang berbagai pilihan pembelajaran, terutama pembelajaran secara jarak jauh atau virtual, pelayanan secara online, command centre, sertifikat elektronik, dll.

5. Learning Delivery System

Yaitu memastikan penerimaan pembelajaran berlangsung dengan lancar, baik secara klasikal maupun maupun non klasikal, diklat dan non diklat, individu dengan coaching dan mentoring, serta pelayanan untuk magang dan pertukaran pegawai.

6. Learning Architecture

Yaitu berkaitan dengan metode, kurikulum, substansi pembelajaran, dan lain-lain agar sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan organisasi dalam hal ini agenda untuk SulSel juara.

7. Learning System

Yaitu berkaitan dengan jenis kompetensi yang akan diprioritaskan, sertifikasi keahlian yang didapatkan, kolaborasi dengan eksternal untuk peningkatan mutu pelayanan, assesment centre, riset dan development, dan lain-lain.

Gambar 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024-2026

TUJUAN (1) PEMBANGUNAN DAERAH
Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel
SASARAN (1) PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
TUJUAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. Meningkatkan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Terwujudnya Smart ASN
SASARAN BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. Meningkatkan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Meningkatkan PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersertifikat Kompetensi 3. Meningkatkan Kompetensi Smart ASN 4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Corpu

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka program dan kegiatan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Program/ kegiatan baik strategis maupun operasional merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Program Operasional, terdiri dari :
 - **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2. Program Strategis, terdiri dari :
 - **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memiliki 1 (Satu) Program Operasional, 1 (Satu) Program

Strategis dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja sebesar **Rp. 35.275.715.355,-**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pada RKPD tahun 2024, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pelaksanaan 2 Program, 9 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 35.275.715.355,-**. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indicator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam RENJA.

Berikut ini dipaparkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan indicator kinerja serta pendanaan indikatif untuk anggaran tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				35.275.715.355				51.710.506.172
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Makassar	98%	31.616.193.388	APBD		100%	40.532.349.835
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		98%		100%					
Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti		0,01%		0,01%					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	23 Dokumen	912.342.000	APBD		28 Dokumen	1.854.513.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	4 Dokumen	773.465.880	APBD		4 Dokumen	1.160.198.820
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	18.240.000	APBD		1 Dokumen	117.360.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	18.240.000	APBD		1 Dokumen	117.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	18.240.000	APBD		1 Dokumen	117.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	18.240.000	APBD		1 Dokumen	117.360.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	15 Laporan	65.916.120	APBD		20 Laporan	224.874.180
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	56 Laporan	24.816.865.288	APBD		56 Laporan	26.572.477.181
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	140 Orang/ Bulan	24.326.671.888	APBD		145 Orang/ Bulan	25.475.387.081
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	12 Dokumen	364.951.680	APBD		12 Dokumen	547.427.520
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	12 Dokumen	30.168.840	APBD		12 Dokumen	121.753.260

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	2 Laporan	30.252.240	APBD		2 Laporan	121.878.360
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar	2 Dokumen	30.096.480	APBD		2 Dokumen	121.644.720
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Makassar	4 Laporan	23.727.600	APBD		4 Laporan	112.091.400
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	2 Dokumen	10.996.560	APBD		2 Dokumen	72.294.840
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	12 Laporan	225.957.600	APBD		16 Laporan	1.171.723.680
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Makassar	-	-	APBD		145 Paket	459.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	12 Dokumen	225.957.600	APBD		12 Dokumen	712.723.680
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	Makassar	50 Unit	1.250.994.038	APBD		55 Unit	2.495.272.694
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Makassar	60 Orang				65 Orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	15 Paket	46.785.120	APBD		15 Paket	412.177.680
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	24 Paket	581.603.458	APBD		24 Paket	512.405.186
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	5 Paket	59.265.000	APBD		12 Paket	358.677.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 Laporan	212.523.660	APBD		12 Laporan	544.542.588
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	12 Laporan	350.816.800	APBD		12 Laporan	667.470.240
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Makassar	31 Unit	380.000.000	APBD		44 Unit	1.530.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Makassar	-	-	APBD		2 Unit	351.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	-	-	APBD		4 Paket	207.000.000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Makassar	1 Unit	100.000.000	APBD		2 Unit	324.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	-	-	APBD		1 Unit	198.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar	30 Unit	280.000.000	APBD		35 Unit	450.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	24 Laporan	2.675.088.643	APBD		24 Laporan	4.618.860.804
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	1.024.150.962	APBD		12 Laporan	1.855.188.702
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	1.650.937.682	APBD		12 Laporan	2.763.672.102
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Makassar	54 Unit	1.354.945.820	APBD		59 Unit	2.289.502.476
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	15 Unit	355.493.800	APBD		15 Unit	823.488.840
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	4 Unit	142.352.020	APBD		4 Unit	508.233.636
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar	1 Unit	50.000.000	APBD		3 Unit	225.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Makassar	2 Unit	610.000.000	APBD		2 Unit	378.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Makassar	30 Unit	197.100.000	APBD		35 Unit	354.780.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	Makassar	100%	3.659.521.967	APBD		100%	11.178.156.337
Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan		100%		100%					
Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		100%		100%					
Jumlah Akreditasi Program Pelatihan		3 Sertifikat		4 Sertifikat					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Makassar	250 Orang	975.352.744	APBD		3500 Orang	3.028.484.581
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Makassar	-	-	APBD		1 Dokumen	233.098.200
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Makassar	-	-	APBD		1 Dokumen	215.098.200

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Makassar	250 Orang	898.196.184	APBD		3500 Orang	2.113.189.981
	Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Makassar	1 Dokumen	77.156.560	APBD		1 Dokumen	467.098.200
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dan Fungsional	Makassar	450 Orang	2.684.169.223	APBD		580 Orang	8.149.671.756
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersertifikat kompetensi		30 Orang				30 Orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Makassar	-	-	APBD		1 Dokumen	274.430.880
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Makassar	-	-	APBD		1 Dokumen	239.185.800
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Makassar	15 Orang	62.731.000	APBD		30 Orang	220.915.800
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Makassar	12 Laporan	112.881.666	APBD		12 Laporan	549.696.396
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Makassar	12 Dokumen	226.304.584	APBD		12 Dokumen	913.599.540
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	450 Orang	2.051.442.373	APBD		580 Orang	5.224.062.220

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	1 Dokumen	230.809.600	APBD		1 Dokumen	727.781.120

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RENJA ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2024, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan target dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan untuk Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta berkelanjutan di Lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi.

Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan. Untuk tahun 2024 Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 2 (Dua) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 35.275.715.355,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 menjadi pedoman bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2024.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA BPSDM Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan, RENJA PD Tahun 2024 ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024;
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan wajib menjadikan dokumen RENJA ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024.
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RENJA secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2024.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh Bidang dan Sekretariat lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan

kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur.

Demikian Rencana Kinerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, 31 Agustus 2023

Kepala Badan,





Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19680202 199403 1 009